

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan dan temuan penelitian dapat diketahui bahwa Revitalisasi fungsi KAN Lawang Mandahiling dalam penyelesaian sengketa adat sudah diwujudkan dengan munculnya Majelis Peradilan adat (MPA) sebagai jalan keluar dari permasalahan sengketa adat yang timbul di Nagari Lawang Madahiling. Adapun hal-hal yang terkait meliputi :

1. Revitalisasi fungsi KAN Lawang Mandahiling sudah diwujudkan dengan dibentuknya sebuah badan khusus yaitu Majelis Peradilan adat yang tujuannya agar permasalahan sengketa adat bisa diselesaikan ditingkat nagari dan dengan metode baru persidangan yang berujung agar para penggugat dan tergugat merasa puas dengan putusan MPA dan disamping itu mewujudkan kembali kehadiran para niniak mamak dan penghulu di mata masyarakat nagari sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai penjaga nilai adat dan hukum adat di nagari Lawang Mnadahiling
2. Kendala KAN dalam penyelesaian sengketa adat masih dibatasi oleh lemahnya SDM dari anggota KAN terutama dibidang penguasaan hukum hukum adat yang saat ini belum mampu menjawab persoalan

di nagari dan peran *ampek jinih* perannya tidak bisa dirasakan dalam menyelesaikan sengketa adat.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoretis

Penelitian ini menyarankan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan tujuan dapat membentuk pemahaman yang komprehensif, khususnya dalam upaya Revitalisasi fungsi KAN dalam penyelesaian sengketa adat di Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kab. Tanah Datar terutama mengenai Majelis Peradilan Adat (MPA) yang mengusung perdamaian berbasis adat.

5.2.2 Saran Praktis

1. KAN Lawang Mandahiling lebih selektif dalam memilih anggotanya sesuai dengan syarat yang disepakati bersama untuk anak nagari kedepannya.
2. Permasalahan kearsipan KAN yang harus diperbaiki dan ada dokumentasi setiap ada kegiatan yang sekiranya bermanfaat untuk generasi mendatang
3. Permasalahan anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup krusial di dalam tubuh KAN sehingga mempengaruhi kinerja dari Anggota KAN itu sendiri, setidaknya ada anggaran dari pemerintahan nagari untuk KAN dalam menjalankan aktifitasnya.